

# Candy's Bowl: Politik Kerukunan Beragama di Indonesia

**Munawar Ahmad**

Dosen Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Diterima redaksi 3 Juli 2013, melalui email munawaroo7@yahoo.com

## Abstract

*Politics Candy Bowl 's start from the assumption that the dispute is social fact that can not be avoided . Disputes will lead to destruction if all parties mutually develop destructive spirit , beat and kill each other . These consequences also can not be avoided and it would be worse if those entities become part of instrumentalization of interest, so thing suppose to be easily resolved become more difficult to be resolved due to the dominancy of the interests behind it. The politic of Agonism requires a plural social life like candy 's bowl where all the candy 's colors still exist, but they are in a protected space which guarantee the independence 's life of all elements without reduced by ideological values beyond them selves*

**Keywords:** Agonisme, Politik Kerukunan, Kekerasan

## Belajar Politik Kerukunan dari Kasus Ahmadiyah

Kehadiran Ahmadiyah sejak tahun 1925 dalam masyarakat Indonesia telah memberi peran yang signifikan terhadap modernisasi pemikiran keagamaan, juga mendorong lahirnya gerakan anti kolonial berdasar pada gerakan persamaan hak dan kesetaraan tanpa melakukan resistensi politik terbuka. Namun, kini kehadiran Ahmadiyah dalam format masyarakat Indonesia post kolonial, justru menjadi

## Abstrak

Politik Candy Bowl's berangkat dari asumsi bahwa perselisihan merupakan fakta sosial yang tidak dapat dihindari. Perselisihan akan menjurus pada kehancuran apabila semua pihak yang berselisih saling mengembangkan semangat destruktif, saling mengalahkan dan membunuh. Konsekuensi ini juga tidak dapat dihindari, apalagi entitas yang berbeda tersebut menjadi bagian dari instrumentalisasi oleh suatu kepentingan, sehingga sesuatu yang mudah diselesaikan, akan semakin berlarut penyelesaikan karena ada dominasi kepentingan dibalik perselisihan tersebut. Politik agonisme menghendaki kehidupan sosial yang plural seperti wadah permen (candy's bowl) dimana semua warna permen tetap eksis, tetapi mereka berada dalam ruang yang melindungi dan menjamin kehidupan merdeka dari seluruh elemen tanpa direduksi oleh nilai-nilai ideologis diluar dirinya.

**Kata kunci:** Agonisme, Politik Kerukunan, Kekerasan

penyebab berbagai kerusuhan berbasis agama pada tingkat akar rumput. Periode 1950-an merupakan periode perkembangan cepat namun juga periode yang penuh kepahitan bagi Ahmadiyah. Para pemberontak DI/TII, membantai beberapa orang Ahmadiyah di Jawa Barat. Kesalahan mereka hanyalah bahwa mereka tetap teguh dalam keimanan mereka, menolak untuk keluar dari Ahmadiyah. Pada tahun 1953, pemerintah mengesahkan Jemaat Ahmadiyah sebagai badan hukum dalam Republik Indonesia.

Organisasi ini berbadan hukum dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sejak 1953 (SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-3-1953). Ini membuka pintu tabligh lebih besar lagi. Pengaruhnya tampak pada tahun 1950-1970 ketika banyak tokoh negara yang sangat akrab dengan Ahmadiyah dan dekat dengan orang-orang Ahmadiyah.

Upaya-upaya negara-negara Islam untuk menghancurkan Ahmadiyah melalui *Rabithah Alam al Islami* semakin nampak di awal 1970-an. Para ulama Indonesia mengikuti langkah mereka. Sehingga ketika *Rabithah Alam al Islami* menyatakan Ahmadiyah sebagai non muslim pada tahun 1974, sebagaimana Majelis Nasional Pakistan melakukan hal yang sama, para ulama Indonesia juga terang-terangan tidak menyukai Ahmadiyah. Sejak saat itu, Jemaat Ahmadiyah Indonesia menghadapi berbagai hambatan dan halangan dalam perkembangannya, baik dalam bidang tabligh maupun dalam bidang tarbiyat.

Tahun 1974, MUI memberikan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah. Halangan dan rintangan tersebut oleh kaum Ahmadiyah dimaknai sebagai penggenapan nubuwatan Nabi Muhammad bahwa para pengikut Imam Mahdi akan menghadapi keadaan yang sama dengan para sahabat Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam Al Quran Surah Al Jumu'ah: 3-4. Kemudian, periode 1980-an adalah periode perjuangan sekaligus penekanan dari pemerintah dan para ulama. Banyak mesjid Ahmadiyah yang dirubuhkan oleh massa. Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyatakan Ahmadiyah sebagai non-Islam. Banyak Ahmadi yang menderita serangan secara fisik. Selanjutnya MUI menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Lalu periode 1990-an menjadi periode perkembangan pesat Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Perkembangan

itu menjadi lebih cepat setelah Hadhrat Khalifatul Masih IV atba, Hadhrat Tahir Ahmad, mencanangkan program Baiat Internasional dan mendirikan Moslem Television Ahmadiyya (MTA). Tahun 1999 saat Abdurrahman Wahid menjadi presiden keempat Republik Indonesia, Ahmadiyah seperti mendapat bapak asuh yang melindungi mereka. Secara terbuka Gus Dur, panggilan akrab Abdurrahman Wahid siap membela kaum Ahmadiyah dari "serangan" umat Islam yang tidak sepakat dengan ajaran Ahmadiyah.

Selanjutnya, tahun 2000 warga Ahmadiyah berhasil menggapai mimpi lamanya untuk mendatangkan pimpinan Ahmadiyah internasional yang berkedudukan di London, Inggris, ke Indonesia. Pimpinan tertinggi Ahmadiyah Hadhrat Mirza Tahir Ahmad ke Indonesia datang dari London menuju Indonesia. Ketika itu dia sempat bertemu dan mendapat sambutan baik dari Presiden Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid dan Ketua MPR, Amin Rais. Tahun 2005, MUI menegaskan kembali fatwa sesat kepada Ahmadiyah. Akibatnya, banyak mesjid Ahmadiyah yang dirubuhkan oleh massa. Selain itu, banyak Ahmadi yang menderita serangan secara fisik.

Dalam hal regulasi, atas nama Pemerintah Indonesia, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung pada tanggal 9 Juni 2008 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama, yang memerintahkan kepada penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam. Penyerbuan yang menimpa warga Ahmadiyah di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, 6 Februari 2011 pukul 10.45 yang mengakibatkan tewasnya tiga orang warga Ahmadiyah adalah peristiwa tragis paling aktual, setelah sebelumnya basis-basis mereka di Parung, Lombok Barat, Makassar, dan tempat-tempat lainnya diobrak-abrik massa.

Dikeluarkannya Fatwa justru telah melahirkan *systemic violence*, massa semakin leluasa bertindak kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah. Kehidupan mereka diganggu, rumah dan masjid yang mereka bangun, juga dirusak bahwa dibakar. Fatwa menjadi energy legal terhadap membenaran atas sikap violence yang diproduksi oleh komunitas Anti-Ahmadiyah. Meskipun logika yang dibangun atas dikeluarkannya fatwa tersebut adalah demi menjadi umat dari kesesatan, telah berubah menjadi sebuah legalitas surgawi atas kekerasan yang dilakukan oleh komunitas tersebut.

Mengingat betapa pentingnya masalah kerukunan tersebut, pemerintah pun berinisiatif untuk melakukan tekanan sebagai upaya menyelesaikan masalah Ahmadiyah yakni dengan mengeluarkan SKB 3 Menteri pada tahun 2008. Ditengah upaya warga Ahmadiyah melakukan pembelaan hukum di lembaga pengadilan sebagai perlawanan yudisialnya. Akan tetapi dikarenakan pemerintah sudah menunjukkan keberpihakannya pada mayoritas, maka, sudah dipastikan tim hukum Ahmadiyah juga mengalami kendala.

SKB 3 Menteri semakin mendesak Ahmadiyah ke ruang minoritas yang lebih parah, bahwa pada tahun yang sama, pengurus Ahmadiyah diminta oleh Negara, melalui Kementrian Agama untuk membuat kontrak politik tidak melakukan penyebaran ajarannya kepada masyarakat. Kontrak politik tersebut tertuang dalam 12 Pernyataan Jemaat Ahmadiyah. Adanya SKB 3 dan 12 Pernyataan justru semakin mempersempit ruang gerak Ahmadiyah semakin terdorong pada killing zone. Fatwa dan SKB 3 menteri pada tingkat akar rumput semakin member inspirasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah yang berisi pelarangan terhadap Ahmadiyah. Kenyataan ini

semakin memicu keberanian massa Anti Ahmadiyah untuk bertindak lebih anarkis menyerang dan merusak berbagai asset milik Ahmadiyah, bahkan satu pemandangan yang menyedihkan, ada sekelompok gerakan dari militer terlibat dalam "operasi Sajadah" yakni mereka mendatangi masjid Ahmadiyah dan mengajak orang-orang Ahmadiyah untuk kembali ke Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat di depan mereka. Fenomena tersebut telah membuktikan bahwa ada scenario besar untuk menekan Ahmadiyah sampai ke akar rumputnya.

Dari berbagai pengalaman dan literature yang terlacak, dapat ditemukan berbagai model politik kerukunan. Kebijakan tersebut berbasis pada politik kerukunan umat beragama di Indonesia, yakni pola sekuler, *melting pot*, *salad bowl* dan Agonisme. Belajar dari sejarah Indonesia sendiri, bahwa kehidupan masyarakat dan juga kehidupan bernegara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari agama. Indonesia pada jaman kerajaan telah menerapkan instrumentalisasi agama oleh kekuasaan, sehingga kekuatan agama didedikasikan untuk kekuasaan raja dan kerajaan, agama menjadi ideology Negara, sehingga menutup kehidupan agama lain yang berbeda. Memang pada saat itu, kehidupan agama kekuasaan, sangatlah maju pesat karena kekuasaan melindungi dan membela ajaran agama kekuasaan tersebut. Antara agama dan kekuasaan telah terjalin hubungan yang saling sinergi dalam mempertahankan hegemoni masing-masing. Namun sayang, kehidupan tersebut telah melahirkan pemberontakan dari kelompok yang tidak menyukai para pemuka agama yang menyatu dengan kekuasaan, maka perang adalah cara kerajaan untuk meredam gerakan makar dari kelompok-kelompok anti-kerajaan.

Kemudian pada jaman penjajah, yang meskipun penjajah datang pada mulannya hanya berbekal semangat

capital, tetapi, seiring dengan misi *Zending* yang ikut dalam gerakan Imperialisme, umat Islam pun dibuat berang karena penjajah telah memaksakan agama baru melalui hegemoni kapitalnya. Hal tersebut memancing reaksi perlawanan dari kaum agamawan untuk melawan imperialism. Politik penjinakan yang dikembangkan oleh imperialisme terbilang efektif untuk meredam gerakan anti-imperialisme berbasis agama.

### **Keragaman Keyakinan: Fakta, Bukan Wacana Sosial**

Salah satu kekayaan bangsa ini yang amat tidak tertandingi oleh bangsa manapun di seluruh dunia adalah keragaman budaya, agama dan sosialnya. Di Indonesia, ada begitu banyak keragaman yang berakar secara alami dari seluruh proses kultural yang bergabung dengan perubahan yang terjadi secara global. Semua bentuk tersebut kini tertata sebagai bagian dari diri kita yang bisa kita saksikan seperti sekarang ini.

Semua perbedaan muncul dan berkembang. Tradisi budaya lahir dan diteruskan turun temurun, perbedaan agama menjadi sebuah warisan, dan kehidupan sosial yang sangat variatif menjadi ciri khas di setiap penjuru negeri. Mudah ditemukan bahwa di setiap wilayah yang berada dalam satu lokasi sekalipun, terdapat perbedaan yang amat nyata. Itu sebabnya kita memiliki ribuan perbedaan yang berdeviasi dari berbagai budaya yang ada sebelumnya. Berbicara tentang hubungan antar agama, wacana pluralisme agama menjadi perbincangan utama. Pluralisme agama sendiri dimaknai secara berbeda-beda di kalangan cendekiawan Muslim Indonesia, baik secara sosiologis, teologis maupun etis.

Secara sosiologis, pluralisme agama adalah suatu kenyataan bahwa kita adalah berbeda-beda, beragama dan

plural dalam hal beragama. Ini adalah kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tidak dapat dipungkiri lagi. Dalam kenyataan sosial, kita telah memeluk agama yang berbeda-beda. Pengakuan terhadap adanya pluralisme agama secara sosiologis ini merupakan pluralisme yang paling sederhana, karena pengakuan ini tidak berarti mengizinkan pengakuan terhadap kebenaran teologi atau bahkan etika dari agama lain.

Penjelasan berikut merupakan uraian yang ditulis oleh Zainul Abas, dari artikelnya yang berjudul *Hubungan Antar Agama di Indonesia : Tantangan dan Harapan*. Terdapat kesan bahwa pandangan tentang *absolutisme* agama didasarkan oleh kandungan ajaran bahwa pemeluk agama tidak dapat objektif terhadap kebenaran lain. Bagi umat Islam barangkali didasarkan pada ajaran bahwa "agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam".

Pengakuan pluralisme secara sosiologis ini juga dikemukakan oleh Mukti Ali. Mukti Ali secara sosial tidak mempersoalkan adanya pluralisme, dalam pengakuan-pengakuan sosial, tetapi ia sangat tegas dalam hal-hal teologis. Ia menegaskan bahwa keyakinan terhadap hal-hal teologis tidak bisa dipakai hukum kompromistis. Oleh karena itu, dalam satu persoalan (objek) yang sama, masing-masing pemeluk agama memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, misalnya pandangan tentang al-Qur'an, Bibel, Nabi Muhammad, Yesus dan Mariam.

Menurutnya, orang Islam melakukan penghargaan yang tinggi terhadap Mariam dan Yesus. Hal itu merupakan bagian keimanan orang Islam. Orang Islam sungguh tidak dapat mempercayai (mengimani) ketuhanan Yesus Kristus tetapi mempercayai kenabiannya sebagaimana Nabi Muhammad. Kemudian, orang Islam juga tidak hanya memandang al-Qur'an tetapi juga Torah dan Injil sebagai

Kitab Suci (Kitabullah). Yang menjadi persoalan, apakah Kitab Bibel yang ada sekarang ini otentik atau tidak, dan apakah seluruhnya merupakan wahyu Tuhan. Hal ini bukan berarti bahwa orang Islam selalu menolak Wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Musa, Isa atau rasul-rasul lain, meskipun orang Islam tidak bisa mengakui bahwa Bibel sebagaimana sebelum mereka hari ini terdiri dari Kalam Tuhan seluruhnya. Namun demikian, orang Islam percaya bahwa Bibel memuat/mengandung Kalam Tuhan (Mukti Ali, 1970: 55).

Tampak Mukti Ali ingin menegaskan bahwa masing-masing agama memiliki keyakinan teologis yang tidak bisa dikompromikan. Islam memiliki keimanan sendiri, bahkan termasuk mengenai hal-hal yang diyakini oleh umat agama lain, misalnya konsep tentang Nabi Isa. Begitu juga, Kristen memiliki keimanan sendiri, bahkan termasuk mengenai hal-hal yang diyakini oleh Islam, misalnya konsep tentang Nabi Muhammad.

Jadi, pengakuan tentang pluralismenya berada pada tataran sosial, yakni bahwa secara sosiologis kita memiliki keimanan dan keyakinan masing-masing. Persoalan kebenaran adalah persoalan dalam wilayah masing-masing agama.

Mukti Ali menjelaskan bahwa ada beberapa pemikiran diajukan orang untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan beragama. *Pertama*, sinkretisme, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. *Kedua*, *reconception*, yaitu menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan agama-agama lain. *Ketiga*, *sintesis*, yaitu menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari pelbagai agama, supaya dengan demikian tiap-tiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah terambil dalam agama sintesis (campuran)

itu. *Keempat*, *penggantian*, yaitu mengakui bahwa agamanya sendiri itulah yang benar, sedang agama-agama lain adalah salah; dan berusaha supaya orang-orang yang lain agama masuk dalam agamanya. *Kelima*, *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan), yaitu percaya bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling baik, dan mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik. Diyakini bahwa antara satu agama dan agama lainnya, selain terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan (A. Mukti Ali, 1992: 227-229).

Mukti Ali sendiri setuju dengan jalan "*agree in disagreement*". Ia mengakui jalan inilah yang penting ditempuh untuk menimbulkan kerukunan hidup beragama. Orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik dan paling benar, dan orang lain juga dipersilahkan, bahkan dihargai, untuk percaya dan yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar (Ibid: 230).

Wacana pluralisme agama Djohan Effendi berbeda dengan pluralisme Rasjidi dan Mukti Ali di atas. Pengakuan pluralisme Djohan Effendi bukan hanya pengakuan secara sosiologis bahwa umat beragama berbeda, tetapi juga pengakuan tentang titik temu secara teologis di antara umat beragama. Djohan tidak setuju dengan absolutisme agama. Ia membedakan antara agama itu sendiri dengan keberagamaan manusia. Pengertian antara agama dan keberagamaan harus dipahami secara proporsional. Menurutnya, agama – terutama yang bersumber pada wahyu, diyakini sebagai bersifat *ilahiyyah*. Agama memiliki nilai mutlak. Namun, ketika agama itu dipahami oleh manusia, maka kebenaran agama itu tidak bisa sepenuhnya ditangkap dan dijangkau oleh manusia, karena manusia sendiri

bersifat nisbi. Oleh karena itu, kebenaran apapun yang dikemukakan oleh manusia –termasuk kebenaran agama yang dikatakan oleh manusia—bersifat nisbi, tidak absolut. Yang absolut adalah kebenaran agama itu sendiri, sementara kebenaran agama yang dikatakan oleh manusia itu nisbi. Kebenaran absolut itu hanya bisa diketahui oleh ilmu Tuhan (Djohan Effendi, 1978: 16; Lihat juga Djohan Effendi, dalam Th. Sumarthana dkk. (ed.) : 54-58).

Sumber utama dari kekacauan itu adalah ketidakmampuan masing-masing negara itu dalam mengelola perbedaan itu. Artinya, perbedaan justru dieksploitasi untuk dijadikan sebagai ideologi yang menjatuhkan satu sama lain. Di sinilah kita mengenal istilah politik keberagaman. Artinya, keberagaman yang tadinya alami kini direduksi menjadi sebuah kebijakan yang berakar dari paradigma politik yang dianut oleh negara atau pemerintah yang berkuasa.

Reduksi atas keberagaman bukan sesuatu yang salah dan dosa politik. Sebab pada dasarnya negara memang harus mengambil alih fungsinya sebagai regulator seluruh sistem yang ada di dalam masyarakat, termasuk keberagaman sekalipun. Tanpa peran negara, maka keberagaman bisa menjadi sebuah fatalisme yang amat parah.

Sayangnya, setiap kali peran negara muncul, yang ada adalah inkonsistensi antara keberadaan keberagaman itu sendiri dengan maksud pemerintah. Kita bukannya tidak pernah mengalaminya. Di masa lalu Orde Lama, ketika rezim yang berkuasa masih sangat dominan, perbedaan dikedepankan dengan jargon yang kala itu amat terkenal: Nasakom. Isinya ada tiga, nasionalisme, agama dan komunisme. Waktu itu, ideologi yang ada memang sangat berpihak kepada komunisme, sehingga kemudian ideologi lain disingkirkan, termasuk perbedaan budaya yang ada. Terkait, beberapa tokoh

kebudayaan kemudian harus masuk bui karenanya. Penguasa memandang bahwa keberagaman ternyata perlu disederhanakan menjadi makna dan tafsir penguasa penguasa saja.

Di masa Orde Baru, keberadaan keberagaman menjadi lebih parah. Kalau yang sebelumnya memandang bahwa keberagaman masih ada dan perlu disederhanakan, penguasa jaman Orde Baru memandang bahwa keberagaman justru tidak ada. Seluruh ideologi disatukan di bawah satu kata, sementara keragaman dianggap tabu untuk dibicarakan. Maka semua keberagaman merujuk kepada Pancasila. Padahal Pancasila sendiri di dalam dirinya memiliki keberagaman. Lalu dikenal pula nama misalnya demokrasi Pancasila. Ternyata semuanya berujung kepada penyatuan seluruh perbedaan politik mendukung penguasa. Padahal nama demokrasi itu sendiri berakar pada perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Di zaman pemerintah yang baru ini, suasana awalnya begitu terbuka dan bebas dalam berekspresi. Sayangnya, belakangan ini muncul sebuah gagasan-gagasan yang berujung kepada politik keberagaman gaya baru. Entah bagaimana caranya, namun yang terlihat di lapangan amat jelas, bahwa penguasa menggunakan legalitasnya untuk “menciptakan” keberagaman namun kemudian menggunakan keberagaman tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Pemerintah sudah saatnya melihat semuanya ini. Pemerintah harus menjadikan perbedaan tetap hidup dan berkembang, namun tidak sampai menjadi sebuah ideologi yang menentukan hidup mati kelompok, etnis, agama, atau entitas tertentu demi kekuasaan dan dukungan politik untuk mereka. Sebab bagaimanapun, keragaman kita di negeri ini tidak dapat dipisah-pisahkan.

Kita, menjadi bangsa seperti sekarang ini justru karena kita berbeda. Kalau mau memajukan bangsa, tidak dengan menyeragamkan. Ketika pemerintah Singapura, China dan Jepang ingin membangun semangat untuk maju pada seluruh warganya, mereka menggali nilai budaya yang merupakan warisan leluhur mereka dan menjadikannya kekuatan untuk maju. Demikian juga seharusnya Indonesia. pemerintah harus menjadikan keberagaman sebagai alat untuk maju dan menjadikan diri lebih baik lagi. Seluruh cara harus dikerahkan supaya kita bisa maju dalam berbagai perbedaan yang ada itu dan dengan bertekun menjadikannya sebagai kekuatan untuk menyatukan bangsa.

Politik Keberagaman merupakan pola partisipasi pemerintah dalam mengembangkan politik berbasis pada kebutuhan dan keinginan dari warganya. Politik ini merupakan manifestasi lain semangat demokrasi. Pemerintah semestinya menjadi pemelihara dan penyedia tatanan masyarakat yang kuat berbasis pada harmoni, semua ide masyarakat tidak ada yang salah atau benar, tetapi ekspresi ide mereka adalah syah hadir dalam kehidupan bernegara.

Dengan demikian politik keberagaman ini memerlukan prasyarat yakni

1. Adanya kemapaman dalam masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi
2. Adanya nilai-nilai luhur yang dihargai sebagai standar kehidupan
3. Memiliki konsistensi dalam menegakkan prinsip
4. Adanya nilai-nilai luhur yang mengawal praktek demokrasi
5. Kuatnya budaya menghargai nilai-nilai kehidupan

Efek politik keberagaman terhadap paham keagamaan, telah menempatkan agama sebagai provider etis dalam menegakan harmoni social. Negara tidak diperkenankan memihak pada nilai-nilai suatu agama, sehingga setiap agama didorong untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran agama masing-masing, termasuk memberi peluang untuk mendirikan rumah-rumah ibadah di dalam masyarakat berbasis pada clustering yang terencana. Negara tidak boleh bebas nilai agama (sekuler) karena Negara merupakan instutusi politik yang bertanggungjawab berhadap keharmonisan hubungan antara agama yang dianuti oleh masyarakat, tetapi Negara juga tidak diperkenankan memihak pada satu institusi agama, Karena dipastikan akan menciptakan keberpihakan dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Politik keberagaman di Indonesia memerlukan format baru, yakni kehidupan agama tidak dapat diperlakukan dalam bingkai politik, yakni selalu meletakkan kecurigaan bahwa agama menjadi kekuatan untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang syah. Indonesia pernah mengalami kehidupan dimana agama menempel dalam kekuasaan, sehingga agama dijadikan instrument politik penguasa untuk bertahan dan melawan berbagai gerakan makar kepada raja dan kerajaan.

Sebagai institusi politik yang formal, Negara memang tidak boleh memihak pada satu agama, tetapi Negara harus dilandasi oleh moral agama, sehingga akan menjadi jaminan jika Negara melaksanakan moral agama, dari agama manapun, dipastikan Negara akan selalu berada dalam equilibrium yang mampu menjadi harmoni. Kejahatan-kejahatan atas nama agama harus diselesaikan secara hukum positif yang konsekuen, karena kekerasan jenis apapun bertentangan dengan norma-noma sosial dimanapun.

Mengingat betapa urgennya masalah politik keberagaman ini bagi sosial, beberapa Negara maju telah melakukan eksperimen bagaimana membuat model-model kehidupan beragam tersebut. Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Australia, juga beberapa Negara Arab telah berani melakukan eksperimen sosial. Eksperimentasi mereka telah melahirkan terobosan baru dalam mencari model, seperti istilah Melting Pot, Salad Bowl, sekuler, dan Agonisme.

## Politik Kerukunan: Eksperimentasi Masyarakat Modern

### 1. Sekularisme

Sekularisme adalah sebuah prinsip pemisahan antara insitansi Negara dan orang-orang yang mendapat mandate sebagai penyelenggara Negara dari institusi agama dan ajaran agama. Ajaran pemisahan ini dapat dilacak dari para filsuf Yunani dan Romawi, juga dikembangkan oleh Ibnu Rusd, kemudian diterapkan oleh beberapa filsuf abad tengah seperti Voltaire, Spinoza, John Locke, dan diterapkan oleh Thomas Jefferson.

Pada intinya para penganjur Sekuler, memandang jika pemisahan agama dari Negara akan memberikan kemajuan yang pesat bagi Negara di dalam mengelola modernitas yang dihadapinya. karena sifatnya, agama tidak boleh menjadi warna dalam pelayanan public, sehingga semua pihak dapat dilayani secara baik dan adil. Modernisasi menghendaki jika semua basis pelayanan kepada masyarakat adalah keterbukaan dan kemudahan.

Istilah Sekularisme, untuk pertama kalinya dikembangkan oleh George Holyoake pada tahun 1851 dalam *The Origin and Nature of Secularism*. Dalam pandangan Holyoake yang dimaksud dengan sekularisme adalah:

*to describe his views of promoting a social order separate from religion, without actively dismissing or criticizing religious belief. Secularism is not an argument against Christianity, it is one independent of it. It does not question the pretensions of Christianity; it advances others. Secularism does not say there is no light or guidance elsewhere, but maintains that there is light and guidance in secular truth, whose conditions and sanctions exist independently, and act forever. Secular knowledge is manifestly that kind of knowledge which is founded in this life, which relates to the conduct of this life, conduces to the welfare of this life, and is capable of being tested by the experience of this life (Holyoake, G.J, 1896: 51).*

Dalam pengertian politik, sekularisme dimaksudkan untuk gerakan yang mengusung pemisahan agama dari pemerintahan, melepaskan hukum positif dari hukum agama menjadi hukum sipil, membatasi deskriminasi berbasis agama. Beberapa Negara yang menerapkan kebijakan sekuler, yakni Amerika Serikat, Perancis, India, Mexico, Korea Selatan, Turki.

Sebenarnya politik sekularisme tersebut memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan pemerintah, seperti dijelaskan oleh para ahli sekularisme, beberapa kondisi sekularisme yang bermanfaat tersebut sebagai berikut:

*Refuses to commit itself as a whole to any one view of the nature of the universe and the role of man in it.*

1. *Is not homogenous, but is pluralistic.*
2. *Is tolerant. It widens the sphere of private decision-making.*
3. *While every society must have some common aims, which implies there must be agreed on methods of problem-solving, and a common framework of law; in a*

*secular society these are as limited as possible.*

4. *Problem solving is approached rationally, through examination of the facts. While the secular society does not set any overall aim, it helps its members realize their aims.*
5. *Is a society without any official images. Nor is there a common ideal type of behavior with universal application.*

Di dalam masyarakat sekuler, dipastikan akan tumbuh, hal-hal sebagai berikut:

1. *Deep respect for individuals and the small groups of which they are a part.*
2. *Equality of all people.*
3. *Each person should be helped to realize their particular excellence.*
4. *Breaking down of the barriers of class and caste*

Namun pada kenyataannya sekularisme telah menutup kanal kekuatan agama untuk masuk mewarnai pemerintahan. Agama dicurigai sebagai entitas lahirnya ketidakadilan dalam pelayanan publik. Ketidakmampuan Negara menjadi sekuler sepenuhnya menjadikan Negara berkolusi dengan lembaga agama secara sembunyi-sembunyi. Kenyataan ini akan menimbulkan inkonsistensi Negara terhadap agama, yang memang sebenarnya agama tidak dapat dihapus perannya dalam kehidupan politik Negara.

## 2. Melting Pot

Istilah *Melting Pot* atau Pot Tempat Mencair adalah istilah metafora terhadap kehidupan heterogenius nya masyarakat menuju masyarakat yang cenderung homogen, dengan kata lain, semua elemen yang berbeda "mencair

bersama" ke dalam ruang harmoni dengan menggunakan kultur bersama. Di Amerika sendiri politik *Melting Pot* ini telah diintroduksirkan sejak tahun 1780 untuk mengantisipasi dampak dari gerakan migrant, melalui *Melting Pot*, Amerika mengajak para migrant untuk berasimilasi ke dalam kultur baru yang ada di Amerika.

Namun sejak tahun 1970, politik asimilasi ini ditentang oleh beberapa orang dengan mengedepankan gerakan multiculturalisme, yang menyatakan bahwa perbedaan budaya di dalam masyarakat merupakan kekayaan masyarakat yang tidak dapat disepelekan. Perbedaan adalah mosaic yang indah seperti Salad Bold, semangkuk salada, semua budaya hidup berdampingan, tetapi tetapi berbeda.

*Melting Pot* dipopulerkan dari sebuah naskah drama karya Israel Zangwill yang berjudul *The Melting Pot* pada tahun 1908. Dalam naskah tersebut Zangwill menggambarkan situasi masyarakat yang mencair, hidup dalam keanekaragaman tetapi mereka mampu mengembangkan kehidupan yang damai tanpa terusik dengan perbedaan yang mereka bawa, mereka hidup dalam sebuah simphony yang romantik. Namun jauh sebelumnya, J. Hector St John deCrevecoeur, pernah menulis sebuah artikel yang berjudul *Letters From an American Farmer (1782)*, sebuah tulisan yang berupaya menjelaskan pertanyaannya sendiri tentang apa yang akan diperbuat oleh para imigran untuk hidup di Amerika sebagai manusia baru (*new man*), secara khusus Hector menuliskannya sebagai berikut:

*"What then is the American, this new man?" that the American is one who "leaving behind him all his ancient prejudices and manners, receives new ones from the new mode of life he has embraced, the government he obeys, and the new rank he holds. He becomes*

*an American by being received in the broad lap of our great Alma Mater. Here individuals of all nations are melted into a new race of men, whose labors and posterity will one day cause great changes in the world."*

*Melting pot* menjadi ikon politik keberagaman di Amerika hingga kini, namun bukan berarti hanya Amerika saja yang menerapkan politik *Melting Pot* ini, tercatat beberapa Negara yang memiliki kekuatan budaya yang aneka, juga menerapkan politik ini sebagai medium homogenitas sesuai yang dicita-citakan oleh penguasanya.

### 3. Salad Bowl

Konsep *Salad Bowl* lebih diarahkan pada integrasi dari berbagai budaya yang berbeda dalam ruang sosial politik. Kesadaran bahwa keanekaragaman unsur budaya adalah mosaik bagi masyarakat, tetapi tetap perlu diarahkan menuju homogenitas yang ideal menurut konsep penguasaan. Seperti halnya "wadah Salad" di dalamnya diisi oleh berbagai jenis bahan sayuran untuk salad, sungguh ideal, menyatu dalam sebuah wadah, tanpa harus mereduksikan warna dan jenis dari kemurnian budaya masing-masing, tetapi tetap harus berada dalam homogenitas. Negara memiliki andil besar dalam membentuk asimilasi menuju format budaya baru. Sebagai contoh kehidupan Singapura yang kaya dengan budaya, juga menerapkan istilah "Masyarakat Rujak" bagi 3 basis kebudayaan Singapore, yakni Melayu, Cina dan India. *Rujak* adalah istilah melayu yang artinya makanan yang dibuat dari sayuran dan buah-buahan dicampur dengan diberi bumbu.

Perbedaan dalam hal budaya memang sangat strategis memainkan peran dalam masyarakat Singapore yang

cenderung *welfare state*, Karena secara territorial, keharmonisan ketiga basis budaya Singapore akan menjadi factor pengubah dinamika bisnis di Singapura, termasuk mengubah peta bisnis kawasan dan dunia.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Indonesia dipandang sebagai Negara yang sangat kaya dengan budaya dan teologi local. Kekayaan tersebut sangatlah dominan membawa perubahan politik di tingkat nasional. Pengalaman telah mencatat jika para penjajah di Indonesia juga memandang bahwa perbedaan yang dimiliki Indonesia ini perlu ditangani dengan serius, khususnya perbedaan berbasis pada teologi.

Jika belajar dari politik asimilasi, model *Melting Pot* atau politik integrasi budaya model *Salad Bowl*, tentu Indonesia dapat menemukan model yang baru dengan beberapa perspektif baru. Politik *Melting Pot* yang diterapkan di Negara-negara multietnik, sangat tetapi jika basis negaranya adalah para migrant, tetapi berbeda jika warga negaranya secara utuh memang sangat beragama sejak mula. Politik *Melting pot* tidak dapat mereduksi perbedaan yang tumbuh dari ruang asal hidupnya, tetapi sangat efektif diterapkan jika perbedaan dibawa ke dalam satu ruang sosial politik baru, dimana adanya tujuan yang sama, mampu mereduksi perbedaan asasi mereka. apalagi peran Negara itu terlibat dalam mengatur kehidupan baru dimana mereka berada. Proses asimilasi dapat diterapkan dengan efektif, walaupun pada akhirnya asimiliasi yang diterapkan justru melahirkan gerakan mereduksi budaya "murni" yang mereka bawa. Maka wajar jika gerakan *Multiculturalism* dikembangkan sebagai reaksi atas hilangnya identitas budaya murni dari para imigran. Gerakan ini cenderung dianggap sebagai ekspresi sebuah pemaksaan Negara kepada warganya

untuk menghapus nilai-nilai individual di dalam masyarakat, padahal di sisi lain, Negara juga tidak mampu menciptakan nilai-nilai baru bagi masyarakat baru tersebut.

Indonesia adalah Negara yang memiliki keragaman latar belakang dari masyarakatnya, yang telah lama hidup dan berada dalam kesadaran sejarahnya. Fakta tersebut tentu tidak lantas Indonesia mengadopsi Melting Pot atau Salad Bowl dalam politik keberagamannya. Penduduk Indonesia sebagian besar adalah bukan migrant, tetapi pribumi yang telah hidup dalam keragaman sejak lama, karena itulah Indonesia patut mengembangkan politik baru berbasis kenyataan ini.

Jika Soekarno mengembangkan *nasionalisme* sebagai basis politik pemersatu, maka sudah selayaknya dalam perspektif keragaman budaya juga memerlukan model baru. Model ini akan menempatkan Negara sebagai kekuatan politik yang tidak *value free*, tetapi tetap mampu menjaga keadilan dalam melayani dan mengayomi masyarakatnya. Negara Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim, tidak lantas menempatkan diri sebagai Negara sekuler dan memusuhi agama, tetapi Negara harus terlihat dalam mengembangkan agama sebagai entitas unik dalam masyarakat Indonesia selain entitas budaya. Negara justru menjadi pemain aktif dalam menangani konflik perbedaan berbasis agama, tetapi Negara tidak boleh terjebak dalam sentiment-sentimen keagamaan yang akan menyeret Negara ke dalam keberpihakan dan ketidakadilan. Kekonsistenan Negara dalam mengelola keadilan ketika berhadapan dengan konflik kepentingan masyarakat agama, menjadi indikator jika Negara Indonesia adalah Negara yang adil dan tidak sekuler.

#### 4. Agonisme: *Candy's bowl*

Pada periode terakhir ini, muncul istilah agonisme sebagai model baru politik keberagaman. Agonisme berasal dari Yunani, *Agonisme*, yang artinya kontestan, juara, lawan, pergumulan. Dalam pandangan politik, Agonisme adalah teori politik yang mengembangkan berbagai potensi positif yang mungkin ada di dalam suatu konflik. Agonisme lebih berupaya sebagai upaya channeling atau kanalisasi atas berbagai potensi konflik yang positif membawa kepada keharmonisan sehingga melahirkan pemahaman yang seimbang terhadap berbagai potensi masyarakat dan menempatkan mereka pada keadaan yang selalu memiliki nilai-nilai positif bersanding dengan potensi destruktif.

Dalam artikelnya, Chantal Mouffe *Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism*, menjelaskan sebagai berikut:

*"I use the concept of agonistic pluralism to present a new way to think about democracy which is different from the traditional liberal conception of democracy as a negotiation among interests and is also different from the model which is currently being developed by people like Jürgen Habermas and John Rawls. While they have many differences, Rawls and Habermas have in common the idea that the aim of the democratic society is the creation of a consensus, and that consensus is possible if people are only able to leave aside their particular interests and think as rational beings. However, while we desire an end to conflict, if we want people to be free we must always allow for the possibility that conflict may appear and to provide an arena where differences can be confronted. The democratic process should supply that arena." (Chantal Mouffe, 2002: 12).*

Basis perhatian Mouffe, terletak pada pemahaman terhadap demokrasi. Pada pemikiran Mouffe, demokrasi selama ini hanyalah dijabarkan pada ranah politik praktis, tidak pada ranah idealitas, yang menyatakan bahwa politik dicipta untuk menciptakan tatanan yang tentram di dalam masyarakat. Jadi sangat lah penting mengelola perbedaan dalam masyarakat. Perlawanan yang diberikan sebagai respon atas eksistensi sebuah perbedaan harus dapat disikapi dengan politik keragaman. Lebih lanjut diungkapkan sebagai berikut:

*Envisaged from the point of view of "agonistic pluralism", the aim of democratic politics is to construct the "them" in such a way that it is no longer perceived as an enemy to be destroyed, but an "adversary", i.e. somebody whose ideas we combat but whose right to defend those ideas we do not put into question. This is the real meaning of liberal democratic tolerance, which does not entail condoning ideas that we oppose or being indifferent to standpoints that we disagree with, but treating those who defend them as legitimate opponents. This category of the "adversary" does not eliminate antagonism, though, and it should be distinguished from the liberal notion of the competitor with which it is sometimes identified. An adversary is an enemy, but a legitimate enemy, one with whom we have some common ground because we have a shared adhesion to the ethico-political principles of liberal democracy: liberty and equality. But we disagree on the meaning and implementation of those principles and such a disagreement is not one that could be resolved through deliberation and rational discussion. Indeed, given the ineradicable pluralism of value, there is not rational resolution of the conflict, hence its antagonistic dimension (Ibid: 36).*

Perbedaan atau keragaman merupakan basis dan kekayaan demokrasi. Dengan demikian, kesadaran keragaman harus dijadikan dasar pembuatan keputusan politik, tidak sebaliknya. Politik keberagaman member tekanan terhadap populasi untuk saling berkompetisi pada ruang saling menghargai, sehingga di dalam ruang demikian, setiap kekuatan, baik mayoritas maupun minoritas saling menjunjung hak-hak sipil, dan penindasan.

Kembali pada kasus Ahmadiyah, dalam perspektif politik kerukunan, mekipun telah ditempuh berbagai model pendekatan, baik bersifat cultural atau dialogis, ataupun judicative atau jalur hukum, selama politik Negara masih berpihak pada mayoritas, selama itu juga kasus minoritas di Indonesia masih sulit untuk berada dalam dimensi demokrasi, tetapi mereka akan tetapi berada dalam hegemony, yang suatu waktu dapat menjadi mesin pembunuh massal.

## Kesimpulan

Potret politik keragaman Negara dalam memandang agama terus bergulir hingga kini. Orde Lama juga menerapkan politik kanalisasi agama untuk berkembang dalam masa perjuangan Indonesia yang berlanjut pada masa Orde Baru, yang lebih intens memperhatikan agama sebagai entitas baru dalam politik kebangsaan. Masa Orde Baru cenderung menempatkan agama dalam politik "Belah Bambu" yakni menggunakan kekuatan agama sekaligus menekan gerakan agama untuk tetap berada dalam paksi-paksi yang dapat dikendalikan sewaktu-waktu. Penumpasan sekaligus pendirian gerakan-gerakan radikal sebagai bagian dari sayap para militer yang disebar di tengah masyarakat menjadi pola baru dari fenomena politik Belah Bambu tersebut. Di sisi lain, secara ideologis, Pancasila dijadikan alat politik

untuk mereduksi gerakan-gerakan anti-pemerintah ke dalam ranah subversif.

Indonesia telah belajar dari sejarahnya tentang bagaimana semestinya belajar mengelola politik kerukunan umat beragama. Dari sekian model yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai basis politik tersebut, yakni menghindari instrumentalisasi agama oleh politik dan mengembangkan konsep Agonisme Politik sebagai paradigma demokratisasi

Resolusi konflik masalah agama ternyata memerlukan ruang politik keagamaan yang jelas dari Negara. Kejelasan tersebut akan menjamin adanya penghargaan atas perbedaan yang dibawa oleh agama secara inherent, tanpa adanya keinginan untuk melakukan tekanan untuk mengubah keyakinan seseorang ataupun kelompok. Politik Agonis menjamin lahirnya lembaga judicial yang adil dalam menyelesaikan konflik agama serta menciptakan ruang yang kondusif untuk tumbuhnya potensi-potensi positif dari masyarakat agama dalam mengelola keharmonisan hidupnya.

Politik *Candy Bowl's* berangkat dari asumsi bahwa perselisihan merupakan fakta sosial yang tidak dapat dihindari. Perselisihan akan menjurus pada kehancuran apabila semua pihak yang berseleisih saling mengembangkan semangat destruktif, saling mengalahkan dan membunuh. Konsekuensi ini juga tidak dapat dihindari, apalagi entitas yang berbeda tersebut menjadi bagian dari instrumentalisasi oleh suatu kepentingan, sehingga sesuatu yang mudah diselesaikan, akan semakin berlarut penyelesaikan karena ada dominasi kepentingan dibalik perselisihan tersebut. Politik pada tingkat praksis memang menjadi mekanisme efektif mengembangkan konflik demi meraih suatu kepentingan. Perbedaan, baik sedikit maupun banyak, diinstrumentalisasi sebagai tenaga yang kuat untuk

melakukan tekanan, serangan dan resistensi kepada pihak lain, sehingga salah satu pihak meraih kepentingan dibalik dampak paska konflik terjadi, tanpa menghiraukan apakah dampak konflik tersebut telah menghancurkan tatanan. Secara ilustrasi politik agonisme menghendaki kehidupan sosial yang plural seperti wadah permen (*candy's bowl*) dimana semua warna permen tetap eksis, tetapi mereka berada dalam ruang yang melindungi dan menjamin kehidupan merdeka dari seluruh elemen tanpa direduksi oleh nilai-nilai ideologis diluar dirinya.

Politik pada arti sebenarnya merupakan satu disiplin pengetahuan manusia yang mencita-citakan bagaimana menata tatanan masyarakat dalam harmoni, bersama-sama meraih keberkahan kolektif yang optimal. Politik keberagaman atau politik kerukunan beragama dimanapun, hendaknya berangkat dari asumsi idealis dari politik itu sendiri, bukan instrumentalisasi agama menjadi alat kepentingan. Politik Agonisme yang dikembangkan oleh para filsuf-filsuf menekankan pada kesadaran atas fakta bahwa perbedaan adalah kenyataan empiris, namun juga menyadari jika dibalik perbedaan tersebut tersimpan potensi negatif dan positif terhadap manusia. Politik Agonisme justru menekankan pada pemberdayaan potensi positif yang tersembunyi dalam ruang konflik, seperti konflik antar dan inter agama. Agama memiliki potensi permusuhan, karena secara teologis, setiap agama memiliki kekhasan yang tidak dapat didialogkan, tetapi hanya dihormati. Namun harus diakui, setiap agama memiliki ajaran kedamaian yang dapat dimplementasikan bersama-sama sebagai kekuatan untuk hidup dalam harmoni. Dalam hal inilah semestinya Negara memiliki *political will* untuk mengembangkan potensi kedamaian yang dimiliki oleh ajaran agama, baik lokal maupun samawi. Jika

memang Negara tidak memiliki *political will* demikian, maka Negara sebagai lembaga, telah menjadi bagian dari *gonicida* terstruktur karena secara sadar menggunakan kekuasaan formalnya melakukan *structural violence*.

### Daftar Pustaka

- Anhar Gonggong, 1986. *HOS Tjokroaminoto*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta,
- Alfian, 1989, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*, Gadjah Mada Press,
- Aqib Suminto, 1999, *Politik Islam Hindia Belanda*, Penerbit LP3ES, Jakarta,
- Ali Mukhayat, 1999, Sejarah Pertablighan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Makalah -----, 1988, Sejarah Ahmadiyah Semarang, Edaran LI No. 55 th. VIII, November 1988.
- Budi Setiyono, *Jejak Tafsir Kaum Ahmadi*, <http://denagis.wordpress.com/2011/08/27/jejak-tafsir-kaum-ahmadi/>
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1999 Benda H.J, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, Penerbit Pustaka Jaya, Jakarta, 1985
- Burhanuddin Daya, 1999, Sumatra Thawalih, dalam Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam di Sumatra Barat, disertasi Doktor
- Djohan Effendi, 1978, "Dialog Antar Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan?", dalam *Majalah Prisma* 5, Juni 1978
- , "Kemusliman dan Kemajemukan Agama" dalam Th. Sumarthana dkk. (ed.), *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*
- Deliar Noer, 1980, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Jakarta
- Iskandar Zulkarnaen, 2000, Sejarah Ahmadiyah Indonesia dari tahun 1920–1940, disertasi Doktor yang dipertanggungjawabkan di hadapan Senat IAIN, Ketua Prof. Dr. Azyumardi Azra
- Moh.Nur Ichwan, 2001, "Differing Responses to an Ahmadi Translation and Exegesis, The Holy Quran in Egypt and Indonesia", *Archipel* 62. Paris, halaman 143-161
- Hamka, tt. Islam Masuk Sumatra Pustaka Nasional, Jakarta
- , 1960, *Ayahku*, Pustaka Nasional, Jakarta
- , 1984, *Islam dan Adat Minangkabau*, Penerbit Pustaka Panji Mas, Jakarta
- Herman L. Beck, 2005, *The Rupture between The Muhammadiyah and The Ahmadiyya*, *Bijdragen tot taal land en volkenkunde*-210-246
- Muhamad Atho Mudhar, 1993, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, INIS, Jakarta.

- MUI, *Kumpulan Fatwa MUI dari Tahun 1975 – sekarang*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Munawar Ahmad, 2004, *Anatomi Antagonisme Masyarakat Agama: Kasus Intimidasi Struktural Ahmadiyah di Indonesia dan Pakistan*, Jurnal Essensia, Vol 5, No.2, Juli 2004
- Mukti Ali, 1970, "Dialog between Muslims and Christians in Indonesia and its Problems" dalam *Al-Jami'ah*, No. 4 Th. XI Djuli 1970,
- , 1992, *Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi*", dalam Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (red.), *Ilmu Perbandingan agama di Indonesia dan Belanda*, (Jakarta : INIS,.
- Quintan Wiktorowict, 2004, *Islamic Activism : A Social Movement Theory Approach*, Indiana Univesity Press, USA.
- Pringgodigdo, 1949, *Sejarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, penerbit Pustaka Rakjat, Jakarta.
- Soekarno, *Di bawah Bendera Revolusi*, jilid I, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera
- Zainul Abas, 2010, *Hubungan Antar Agama di Indonesia : Tantangan dan Harapan*, e-text.